

ANALISIS PERAN AKUNTANSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Risha Novia Haryadi
rishanovial@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the role of accounting and problems happened in order to have Good Governance at Surabaya Social Office. Besides, it aimed to find out some principles in having Good Governance, namely, accountability, transparency, responsibility, efficient, effectiveness and strategic vision which looked to give better outcome. The research was qualitative. While, the instruments used interview, observation and documentations. Meanwhile, the subjects of interview were head of finance department, staffs and expenditure treasurer of Surabaya Social Office. The research result concluded accounting was very important to gain accountability in presenting, reporting and to have accountable public performance report. Moreover, all people could have transparency of annual financial statement with accounting. Furthermore, with accounting, the management of fund budget was considered accountable. Additionally, by having accounting, the role and authority in distributing APBD funds became efficient and effective. In addition, to have strategic vision, with accounting, the use of funds looked accurately for society. On the other hand, accounting gavelittle effect on program sustainability, when it related to internet network and some human resources who did not fully aware of accounting. In short, accounting eased to have Good Governance in public organization since it handled problems well.

Keywords: good governance, public organization, accounting role

ABSTRAK

Hasil analisis dalam penelitian ini adalah mengenai peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Sosial Kota Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa sangat penting untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, peran akuntansi dapat membantu menyajikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan kinerja sektor publik. Dalam mewujudkan transparansi, peran akuntansi terbuka dan semua lapisan masyarakat bisa melihat laporan keuangan tahunan. Dalam mewujudkan responsibilitas, peran akuntansi sangat penting dalam pengelolaan anggaran dana. Dalam efisiensi dan efektivitas peran akuntansi membantu tersalurkannya dana APBD untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan. Sedangkan dalam mewujudkan visi yang strategis, akuntansi berperan untuk mengatur penggunaan dana agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk hambatan akuntansi tidak terlalu berdampak terhadap kelangsungan program dan kegiatan yang dilakukan, hanya terkadang masalah jaringan internet dan SDM yang masih belum sepenuhnya paham dengan akuntansi, tetapi hal itu bukan masalah besar untuk mewujudkan *good governance* dalam organisasi sektor publik karena semua dapat diatasi dengan baik.

Kata Kunci : *good governance*, organisasi sektor publik, peran akuntansi

PENDAHULUAN

Good governance pada dasarnya adalah sebuah konsep sebagai suatu metode atau pola yang dapat terwujud jika terdapat tiga pilar pendukung yang berfungsi dengan baik yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat madani dalam suatu negara. Konsep pemerintahan yang baik adalah pemerintah dengan otoritas negara, di mana ada banyak prinsip yang mendukung implementasi organisasi yang tepat. *Good governance* berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mencakup banyak pedoman yang terdiri

dari tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, kepastian hukum, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Dalam hal tata kelola yang baik, ada beberapa prinsip yang dapat diimplementasikan dengan baik melalui peran akuntansi. Akuntansi sangatlah penting, dalam hal ini akuntansi adalah sistem informasi yang membantu memenuhi tugas organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam organisasi sektor publik, peran akuntansi dalam mencapai *good governance* sangat penting untuk mendukung terciptanya akuntabilitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, dan visi strategis. Akuntansi saat ini bukan hanya instrumen untuk merekam peristiwa ekonomi, tetapi merupakan tujuan dalam setiap proses. Di setiap unit ekonomi, sektor publik dan akuntansi swasta berkontribusi pada pemrosesan sumber daya dalam unit. Kontribusi akuntansi perusahaan meliputi penciptaan kontrol internal, pengujian akuntabilitas, dan penyediaan informasi yang andal dan transparan. Untuk setiap perusahaan yang membutuhkan proses akuntansi, tujuan perusahaan dapat dihitung dan dicapai dengan benar.

Dinas Sosial Kota Surabaya adalah salah satu organisasi sektor publik dari lembaga pemerintahan negara. Dalam hal ini dinas sosial menjadi wadah bagi relawan sosial dan pekerja sosial serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial. Sebagai organisasi sektor publik, dinas sosial dapat melayani segala bentuk kebutuhan dan hak publik. Tujuan organisasi sektor publik bersifat nonprofit artinya bahwa pelayanan kepada publik adalah hal paling utama yang harus diutamakan dan dilaksanakan. Organisasi ini memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan parlemen serta anggaran yang dimiliki bersifat terbuka untuk publik karena sumber dana tersebut berasal dari masyarakat yang nantinya kembali lagi ke masyarakat. Tata pemerintahan yang baik memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja masyarakat. Dinas Sosial Kota Surabaya juga harus memberikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku laporan keuangan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan, dapat diandalkan dan transparan sehingga perumusan kebijakan dan keputusan Dinas Sosial Kota Surabaya dapat digunakan sebagai referensi bagi para pemangku kepentingan untuk mengekspresikan aspirasinya. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik adalah untuk mendukung penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, sehingga informasi tentang laporan keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya dapat dipertimbangkan dan transparan bagi perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Akuntansi juga berperan dalam menyediakan perhitungan untuk mencapai kegiatan yang diprogramkan untuk menyelesaikan kegiatan yang direncanakan dan berfungsi dengan baik.

Pemerintah merupakan bentuk dari entitas yang mempunyai fungsi dan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 6 PERDA Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Surabaya mengenai susunan organisasi, kedudukan, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Surabaya. Diantaranya fungsi-fungsi Dinas Sosial antara lain: perumusan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, serta pelaksanaan fungsi lain diutus oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk mendukung berjalannya fungsi dan tugas dari dinas sosial terdiri beberapa elemen-elemen penting didalamnya antara lain kepala dinas, sekretariat, bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kelompok jabatan fungsional serta bidang perlindungan sosial dan penanganan bencana. Langkah yang dapat di ambil untuk mencapai *good government governance* adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah yang adil, transparan dan bertanggung jawab. Akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Menurut

Mardiasmo (2002), bahwa tata kelola yang baik dan akuntansi di sektor publik sangat terkait, dengan akuntansi sektor publik sebagai alat untuk untuk melakukan elaborasi *good governance* dengan cara yang lebih tertib. Disini pemerintah daerah harus menyadari bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik dan masyarakat berhak mengetahuinya. Disimpulkan dari latar belakang tersebut bahwa *good governance* dapat terwujud apabila prinsip-prinsip *good governance* dapat terlaksanakan dengan baik. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Sosial Kota Surabaya?

TINJAUAN TEORETIS

Teori Akuntansi

Akuntansi pemerintah adalah suatu aktivitas jasa yang mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan dan yang diterapkan pada pengelolaan sumber dana publik di lembaga-lembaga pemerintah tingkat tinggi dan mencakup departemen-departemen di bawahnya (Sujarweni, 2015:1). Sedangkan akuntansi dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, menghitung, meringkas peristiwa dan transaksi keuangan, serta penyajian hasilnya. Sektor publik adalah sektor yang mengelola dana masyarakat. Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan akuntansi yang dilakukan untuk transaksi keuangan oleh organisasi sektor publik (Siregar, 2017:1-3). Menurut Pontoh (2013:1) akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur kegiatan bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan menyampaikan hasil kepada para pengambil keputusan. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menciptakan informasi dan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi.

Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016:3), sistem akuntansi adalah bentuk catatan dan laporan yang disusun untuk memberikan informasi keuangan yang harus dikelola oleh manajemen. Tujuan sistem akuntansi adalah menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan bisnis baru, meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada dalam hal kualitas, ketepatan penyajian atau struktur informasi untuk meningkatkan pengendalian akuntansi dan pengendalian akuntansi internal, yaitu untuk meningkatkan keandalan dan kinerja, memberikan informasi tentang kewajiban dan melindungi aset perusahaan dan mengurangi biaya administrasi (Mulyadi, 2013:19). Selain tujuan yang telah ditetapkan, sistem akuntansi memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi yang benar dan akurat, sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas *value chain* secara efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya. Produksi produk yang dihasilkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja bisnis, baik di departemen keuangan maupun departemen lainnya, meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, dan meningkatkan peran berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*).

Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2009:5), laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan serta kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan ini adalah untuk kepentingan umum dalam memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja dan arus kas dari entitas yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan bagi para pengguna. Menurut Hariadi *et al.*, (2010:122), laporan keuangan berisi informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Entitas pelaporan wajib untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil

pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan terstruktur selama pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, pengelolaan, transparansi, keseimbangan antar generasi dan penilaian kinerja. Laporan keuangan dapat mengungkap dan menginformasikan empat kegiatan perusahaan, yaitu perencanaan, pembiayaan, investasi dan operasional (Sadeli, 2015:3). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang penting dari laporan keuangan secara sederhana adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau masa yang akan datang. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan.

Good Governance

Terdapat tiga pilar elemen dasar yang terkait dengan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (Osborne and Gaebler, 1992; OECD and World Bank, 2000; LAN dan BPKP, 2000: 6) yaitu adalah: (1) Transparansi adalah keterbukaan tata kelola pemerintahan, lingkungan, ekonomi dan sosial, (2) Partisipasi adalah penerapan keputusan demokratis dan pengakuan hak asasi manusia, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, (3) Tanggung jawab adalah kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas dan bila belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi.

Asas Good Governance

Menurut UNDP karakteristik pelaksanaan *good governance* meliputi: 1) *Participation*. Partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan suaranya. Partisipasi tersebut didasarkan pada kebebasan berserikat dan berekspresi serta partisipasi konstruktif (2) *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang (3) *Transparency*. Transparansi didasarkan pada kebebasan memperoleh informasi. Informasi kepentingan umum dapat diperoleh langsung dari pihak yang membutuhkan (4) *Responsiveness*. Instansi pemerintah harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders* (5) *Consensus of orientation*. Berpusat pada kepentingan masyarakat yang lebih luas (6) *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan (7) *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan dana publik efisien dan efektif (8) *Accountability*. Tanggung jawab kepada publik untuk setiap aktivitas yang dilakukan (9) *Strategic vision*. Pejabat pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jangka panjang (Mardiasmo, 2004:18).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP adalah laporan yang menyajikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. LAKIP disusun sesuai dengan siklus anggaran yang berjalan dalam satu tahun secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Di dalam penyusunan kegiatan belanja dibuatlah suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan dan hasil yaitu suatu bentuk yang didapatkan dari dana yang telah dikeluarkan. Adapun fungsi dan manfaat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diantaranya: (1) sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial Kota Surabaya, (2) sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi SKPD Dinas Sosial Kota Surabaya, (3) sebagai informasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, (4) sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Surabaya terhadap kemampuan dana atau anggaran yang di kelola dan (5) memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada (LAKIP Dinas Sosial,2019:32).

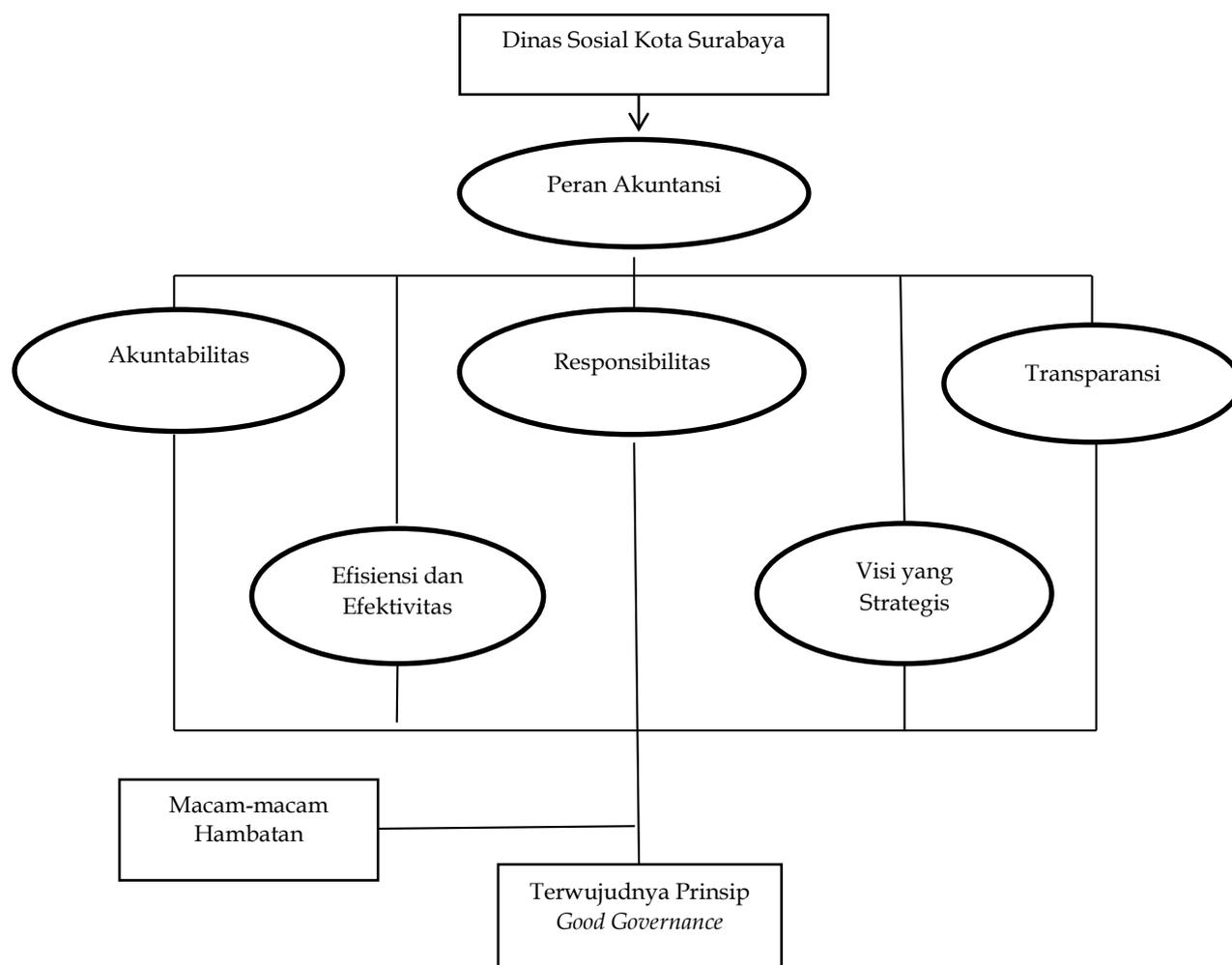
Organisasi Sektor Publik

Menurut Mahsun *et al.*, (2007:4-5) berbagai organisasi terwakili dalam sektor publik di Indonesia termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, berbagai perusahaan di mana

pemerintah memiliki saham (BUMN dan BUMN) organisasi pendidikan, organisasi kesehatan dan organisasi masyarakat/massa. Kerangka organisasi Organisasi harus menyediakan kerangka kerja manajemen sebagai pedoman untuk kegiatan atau proyek dan sebagai dasar untuk keputusan organisasi. Menurut Bastian (2006:63) definisi organisasi publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat seperti: Organisasi LSM dan Parpol, Organisasi Pemerintah Pusat, Organisasi Pemerintah Daerah, Organisasi Pendidikan dan Kesehatan, seperti : PMI, puskesmas, rumah sakit, dan sekolah, Organisasi Tempat Peribadatan: masjid, vihara, kuil, gereja dan Organisasi Yayasan.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teoritis tersebut dibentuk dalam sebuah rerangka pemikiran seperti terlihat pada Gambar 1:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:15) bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Subjek dan objek penelitian

adalah sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang dapat dibuktikan secara objektif. Pengertian subjek dan objek penelitian menurut Sugiyono (2013:32) adalah subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Subjek penelitian penting karena hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan. Objek penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efisiensi dan efektivitas, dan visi yang strategis. Kelima pilar yang disebutkan adalah prinsip yang terkandung dalam *good governance*, dan apabila kelima pilar tersebut dilakukan dengan baik maka akan tercipta *good governance* pada Dinas Sosial Kota Surabaya yang terletak di Jl. Arief Rachman Hakim No.131-133, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dimana data primer diperoleh secara langsung saat di lapangan dan sesuai dengan keadaan saat melakukan penelitian dan data tersebut diambil dengan menggunakan teknik wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dan data tersebut diambil dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yang merupakan proses wawancara yang menggunakan pedoman wawancara dalam melakukan penggalan data dengan peneliti menetapkan masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang untuk ditujukan kepada partisipan atau informan. Pertanyaan yang diajukan harus dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang peran akuntansi dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efisiensi dan efektivitas, dan visi yang strategis pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Wawancara akan dilakukan dengan informan yang terkait dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang permasalahan yang akan diteliti, yaitu bagian keuangan dan bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kota Surabaya atau pihak yang berwenang memberikan informasi.

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi berupa dokumen terkait yang ada pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah cara peneliti mengambil informasi berupa foto, file atau duplikat atas laporan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya untuk menjadikan pendukung dan bukti dalam penelitian ini. Dokumentasi dapat memperkuat jawaban partisipan atas pertanyaan yang diajukan dan sebagai bahan pendukung bahwa peneliti benar melakukan penelitian di objek penelitian.

Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Satuan kajian yang dipilih dalam penelitian ini adalah peran akuntansi dan *good governance*. (1) Peran akuntansi adalah kegiatan atau proses yang berkontribusi untuk mencapai *good governance* dalam kegiatan organisasi di sektor public, (2) *Good governance* dalam penelitian ini diharapkan terwujud dalam organisasi sektor publik dengan bantuan peran akuntansi. Organisasi sektor publik untuk menuju tata kelola yang baik harus dapat menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dengan metode kualitatif, yaitu dilakukan dengan menginterpretasikan dan menjelaskan data-data yang sudah terkumpul. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu: wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: (1) Mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dan data-data seperti dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti berkaitan dengan Dinas Sosial Kota Surabaya, (2) Mengelompokkan hasil wawancara yang berupa data primer untuk ditarik kesimpulan sementara, (3) Melakukan analisis data yang telah diperoleh dari beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini di Dinas Sosial Kota Surabaya dan di kroscek sesuai dengan teori yang ada, (4) Memahami penerapan *good governance* pada Dinas Sosial Kota Surabaya untuk di analisis apakah sudah sesuai dengan standart pemerintahan, (5) Dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut maka dapat disimpulkan penerapan-penerapan *good governance* pada Dinas Sosial Kota Surabaya dan mengetahui efektif dan efisien serta dapat mengetahui bagaimana kendala yang terjadi dalam penerapan penerapan *good governance* pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Surabaya

Dinas Sosial Surabaya merupakan salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kota yang melaksanakan hak pembangunan di bidang sosial. Perencanaan ini disusun menjelang tahun anggaran baru sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas selama satu tahun dan pada akhir tahun dijadikan alat ukur untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan dinas. Karena jika dilihat kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya merupakan pembangunan non fisik, sehingga hasilnya tidak dapat dilihat dan dinikmati secara instan. Namun demikian, Dinas Sosial selalu berusaha untuk mengurangi jumlah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program dan kegiatan tahun 2018 dan 2019. Di penghujung tahun, Dinas Sosial Kota Surabaya akan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kinerja SKPD atau laporan kinerja yang lebih dikenal luas dengan latar belakang pengakuan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan pembangunan pemerintahan yang bersih. Maksud dari penulisan Laporan Kinerja Dinas Sosial ini adalah untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan kegiatan bakti sosial di Kota Surabaya. Rencana dan kegiatan tersebut telah ditetapkan pada awal tahun 2018 dan 2019 serta masuk dalam Rencana Kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2018 dan 2019, serta diimplementasikan pada 2018 dan 2019. Sedangkan maksud dari Laporan Kinerja Dinas Sosial adalah untuk memberikan gambaran tentang pencapaian target dan sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2018 dan 2019.

Pembahasan

Peran Akuntansi dalam Mewujudkan Akuntabilitas

Dalam mewujudkan akuntabilitas pada organisasi sektor publik sangat penting untuk menunjang terlaksananya target dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga tugas dan wewenang dapat lebih mudah dijalankan. Dinas Sosial Kota Surabaya mengimplementasikan prinsip akuntabilitas sudah baik. Hal ini didukung dari hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Bapak Reza Fahredi selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya menyatakan bahwa:

“Untuk model laporan yang diterapkan disini adalah basis akrual karena mengacu kepada praktik manajemen keuangan modern di sektor publik. Tujuan basis akrual itu sendiri adalah mendukung terciptanya akuntabilitas publik yaitu menyajikan, melaporkan, mengungkapkan, dan

mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan laporan Dinas Sosial Kota Surabaya” (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya).

Adapun pernyataan tambahan yang disampaikan oleh Diah Eka Safitri pada tanggal 31 Agustus 2020 selaku Staff Keuangan pada Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai berikut:

“Prinsip yang digunakan adalah akrual basis karena pada dasarnya pencatatan, pengakuan dan penyajian yang kita lakukan pada saat terjadi transaksi tersebut” (Staff Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya).

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan Bu Reni pada tanggal 31 Agustus 2020 selaku bagian bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai berikut:

“Dalam hal ini akuntansi sangat membantu kita untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam organisasi kita karena sistem akuntansi dapat memudahkan kita dalam menjalankan tugasnya. Akuntabilitas juga sangat didukung dengan adanya akuntansi. Sehingga menurut saya peran akuntansi sangat penting untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas” (Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Surabaya).

Peran Akuntansi dalam Mewujudkan Transparansi

Pengertian transparansi itu sendiri bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan, yaitu adanya sistem yang memungkinkan terjadinya komunikasi internal dan eksternal dalam organisasi, serta keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan tentang masalah yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Dan juga keterbukaan informasi serta penyebaran informasi yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar. Prinsip ini telah diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, artinya memiliki akses data yang mudah dan terbuka terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, contoh informasi yang berkaitan dengan laporan kegiatan adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Hal tersebut didukung akan hasil wawancara menurut pendapat Bapak Reza Fahredi selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 menyatakan bahwa:

“Peran akuntansi sangat penting sekali, dan di Dinas Sosial ini menurut saya sudah terpenuhi karena masyarakat juga dilibatkan mulai dari perencanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) sampai menjadi anggaran. Disini laporannya sudah diwakilkan oleh DPRD karena anggarannya telah diatur semua oleh DPRD. Maka dari itu masyarakat pasti tahu program dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan” (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Diah Eka Safitri selaku Staff Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut :

“Akuntansi berperan untuk menyebar luskan informasi yang telah di buat oleh Dinas Sosial dan sudah transparan pastinya, karena program yang kita lakukan sudah banyak masyarakat yang mengetahuinya” (Staff Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya).

Selanjutnya Ibu Reni selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 juga menambahkan pernyataan sebagai berikut:

“Transparansi menurut saya penting maka dari itu peran akuntansi sangatlah berperan dalam mewujudkan transparansi itu sendiri karena di dalam laporan itu kita bisa mengetahui kegiatan apa saja yang dijalankan selama setahun penuh dan dana yang telah digunakan digunakan untuk apa saja” (Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Surabaya).

Dengan ini dapat disimpulkan dalam mewujudkan transparansi pada organisasi sektor publik, peran akuntansi sangatlah penting karena berkaitan dengan keterbukaan supaya masyarakat dapat mengetahui aliran informasi serta menjamin bahwa informasi mengenai kebijakan dan kinerja dari institusi pemerintah telah dikumpulkan dan diberikan kepada masyarakat secara memadai dengan adanya pemberian data atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai dan dapat dipahami supaya masyarakat juga mengerti hal-hal apa saja yang telah diselenggarakan oleh pihak pemerintah serta membangun rasa percaya antara pemerintah dan masyarakat. Informasi yang disebarakan Dinas Sosial Kota Surabaya seperti contoh informasi yang berkaitan dengan laporan kegiatan adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 sehingga masyarakat mengetahui kebijakan-kebijakan yang berlaku serta mudah memperoleh informasi.

Peran Akuntansi dalam Mewujudkan Responsibilitas

Pengertian responsibilitas sendiri adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak jauh dari proses pelayanan publik dilaksanakan sesuai prinsip atau Ketentuan administrasi dan organisasi yang tepat dan terorganisir. Akuntansi juga harus bertanggung jawab untuk mengalokasikan APBD agar memiliki nilai ekonomis. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Reza Fahredi selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

“Untuk responsibilitas yang dilakukan Dinas Sosial sendiri itu pasti bertanggungjawab karena akuntansi sendiri adalah pelaporan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan di lapangan. Dan sudah menggunakan sistem, jadi laporannya tinggal input saja” (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bu Reni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut :

“Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Di sini, akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan anggaran. Dengan akuntansi kita dapat menentukan APBD yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan rakyat” (Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Surabaya).

Diah Eka Safitri selaku Staff Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 menambahkan pernyataan sebagai berikut :

“Penggunaan APBD yang telah dianggarkan untuk mensejahterakan masyarakat saya rasa sudah sangat transparan dan pastinya Dinas Sosial bertanggungjawab akan hal itu” (Staff Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya).

Maka disini peran akuntansi sangat diperlukan untuk mewujudkan responsibilitas pada organisasi sektor publik. Menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara periodik dimana peran akuntansi sangatlah membantu organisasi sektor public sehingga dapat disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan

mengenai pemerintah pusat ataupun daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan bahwa dana yang telah digunakan sektor publik tersebut telah menggunakan dana APBD secara ekonomis dan optimal. Bentuk laporan keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Peran Akuntansi dalam Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas

Dalam mewujudkan prinsip efisien dan efektivitas peran akuntansi sangatlah penting karena akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik dalam menentukan pemakaian dana APBD yang telah dianggarkan agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh walikota secara efisien dan efektif. Hal ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Reza Fahredi selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

“Selama ini sudah efisien dan efektif karena dana APBD yang telah diberikan oleh pemerintah tersalurkan melalui UPTD yang ada. Contoh di Keputih itu khusus mengurus orang gila dan orang terlantar, lalu di Kampung Anak Negeri itu mengurus anak terlantar tetapi setelah 18 tahun ke atas anak - anak tersebut harus keluar dari sana, maka dari itu disana mereka akan dibekali keterampilan agar istilahnya bisa bertahan hidup jika sudah keluar dari Kampung Anak Negeri. Selanjutnya ada Griya Werdha untuk panti lansia dan terakhir Babat Jerawat untuk penderita kusta. Sisanya ada pelayanan administrasi seperti surat keterangan miskin itu mengurusnya di kantor Dinsos” (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya).

Pernyataan diatas juga didukung oleh penjelasan dari Diah Eka Safitri selaku Staff Keuangan pada Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

“Dalam mewujudkan prinsip efisiensi dan efektivitas sangat terbantu dengan adanya peran akuntansi, contohnya sistem informasi berbasis website yang biasa digunakan disini meliputi SABK (Sistem Anggaran Berbasis Kinerja), SIPK (Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan), *e-delivery*, dan *accounting*. Sehingga mempermudah menjalankan tugas dan wewenang yang telah diberikan agar tugas dan wewenang tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien” (Staff Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya).

Bu Reni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 menambahkan pernyataan sebagai berikut :

“Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas dalam organisasi sektor publik sendiri sudah memenuhi karena selama ini implementasinya menggunakan aplikasi dan ada tentang standart harga satuan. Sehingga dana APBD sudah jelas digunakan untuk apa saja” (Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Surabaya).

Dari wawancara diatas, pengelolaan dana APBD sudah terlaksana secara efektif dan efisien dengan bekerja secara cepat dan tanggap dalam melaksanakan semua kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sehingga hasil yang didapat sesuai dengan rencana. Pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat terbatas, hal tersebut yang menjadikan organisasi sektor publik sangat membutuhkan peranan akuntansi dalam mengelola dana APBD supaya biaya-biaya yang digunakan menjadi efisien dan efektif.

Peran Akuntansi dalam Mewujudkan Visi yang Strategi

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota Surabaya supaya dapat terwujud maka Penyusunan dokumen perencanaan tahunan di tingkat perangkat daerah pemerintah kota sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas selama satu tahun dan pada akhir tahun dijadikan alat ukur untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan rencana kerja Dinas Sosial menggunakan dana dari pemerintah yaitu berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan untuk setahun kedepan.

Disini peran akuntansi sangat berpengaruh dalam mewujudkan visi yang strategis pada kinerja Dinas Sosial karena keberadaan RENJA harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kota Surabaya dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kota Surabaya.

Hal ini selaras dengan dengan penjelasan Bapak Reza Fahredi selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

“Salah satu cara untuk mewujudkan visi yang strategis adalah mempergunakan anggaran APBN berupa kegiatan kepada masyarakat dan selama ini rata - rata sudah terlaksana dengan baik tetapi tidak dipungkiri terkadang anggaran tersebut kurang dikarenakan masyarakat yang ada di lapangan masih lebih banyak lagi yang membutuhkan bantuan dengan berbagai macam faktor” (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya).

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Bu Reni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

“Akuntansi juga sangat berperan penting dalam hal ini menurut saya karena kita harus bisa menggunakannya secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun. Hal itu juga dikarenakan dana APBD juga terbatas maka dari itu sebisa mungkin digunakan secara bijak” (Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Surabaya).

Diah Eka Safitri selaku Staff Keuangan pada Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 juga menambahkan pernyataan sebagai berikut:

“Ya akuntansi berperan dalam mewujudkan visi yang strategis pada Dinas Sosial, karena dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) dana nya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jadi harus bisa mengelola dana tersebut dengan baik agar rencana kerja yang telah disusun dapat terlaksanan dengan baik jadi kita tinggal menjalankannya saja” (Staff Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya).

Dengan ini dapat disimpulkan jika faktor yang dapat menunjang terwujudnya visi yang strategis itu sendiri adalah pentingnya peran akuntansi disini. Dengan adanya akuntansi dalam suatu organisasi sektor publik kita dapat mengatur dan mempertimbangkan mengatur dana APBD yang telah diberikan pemerintah sebagai sarana untuk melaksanakan rencana kerja dan keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun oleh Dinas Sosial Kota Surabaya.

Hambatan Peran Akuntansi dalam Mewujudkan *Good Governance*

Hambatan yang terjadi dalam upaya peran akuntansi mewujudkan *good governance* pasti ada namun tidak terlalu berdampak terhadap kelangsungan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Surabaya. Hal ini selaras dengan dengan penjelasan Bapak Reza Fahredi selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

“Hambatan selama ini tidak begitu banyak karena pelaksanaannya disini juga serba menggunakan aplikasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku” (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya).

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bu Reni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

“Hambatan yang terjadi biasanya tentang sumber daya manusia yang masih belum paham tentang akuntansi karena tidak semua yang bekerja disini adalah lulusan dari bidang akuntansi, tetapi masih bisa diatasi oleh pegawai - pegawai Dinsos” (Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Surabaya).

Adapun pernyataan tambahan yang disampaikan oleh Diah Eka Safitri pada tanggal 31 Agustus 2020 selaku Staff Keuangan pada Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai berikut:

“Hambatan yang terjadi biasanya hanya masalah jaringan internet karena disini hampir semua perkerjaannya membutuhkan jaringan internet. tetapi itu juga tidak menjadi masalah yang signifikan” (Staff Keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya).

Dengan demikian, hambatan yang terjadi pada Dinas Sosial Kota Surabaya tidak akan berpengaruh buruk terhadap kinerja suatu organisasi sektor publik, karena hambatan-hambatan semacam itu memang lumrah terjadi hampir di semua organisasi. Yang dibutuhkan disini hanyalah kerja sama dalam mengatasi hambatan agar proses mewujudkan *good governance* bisa berjalan dengan baik.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Dinas Sosial

Tantangan

Tantangan pada pengembangan layanan Dinas Sosial Kota Surabaya yakni, (1) belum optimalnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan dan penganggaran program pembangunan kesejahteraan sosial antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam rangka menciptakan pelaksanaan program pembangunan yang sistemik, (2) Masih perlunya peningkatan komitmen bersama antar daerah Kabupaten maupun kotamadya dalam penanganan PMKS, sehingga berpengaruh pada pencapaian kinerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara umum dan dapat meningkatkan efektivitas, (3) Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial kontemporer, seperti *human trafficking*, balita yang ditelantarkan, HIV/ AIDS, permasalahan sosial lintas provinsi/daerah dan lain -lain, (4) Kecenderungan berkembangnya individualisme dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan semakin lunturnya nilai kesetiakawanan sosial, (5) Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta fluktuasi interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya bencana alam dan sosial, (6) Peran serta masyarakat dan dunia usaha masih perlu ditingkatkan, hal ini penting mengingat keterbatasan sumber dana pembangunan kesejahteraan sosial yang disediakan pemerintah.

Peluang

Selain berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Surabaya dalam menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga terdapat berbagai peluang yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial antara lain yaitu, (1) dukungan peraturan dan perundang-undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, (2) Semakin meningkatnya komitmen legislatif dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di kota Surabaya, (3) Berkembangnya kelembagaan sosial peduli permasalahan kesejahteraan sosial, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berikut adalah kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh peneliti diantaranya: (1) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Sosial Kota Surabaya telah melakukan implementasi prinsip-prinsip *good governance* sehingga meningkatkan kinerja organisasi sektor publik, (2) Secara keseluruhan Dinas Sosial Kota Surabaya telah menerapkan prinsip *good governance* dalam organisasi sektor publik dengan melibatkan akuntansi didalamnya, (3) Prinsip akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, serta visi dan misi yang strategis pada Dinas Sosial Kota Surabaya dapat diwujudkan dengan adanya peran akuntansi, karena akuntansi sangat penting dan berkesinambungan dalam hal menyajikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan kinerja sektor publik sesuai dengan prinsip laporan keuangan akrual basis berdasarkan peraturan yang berlaku. Akuntansi juga berperan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan. Dalam melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBD, maka laporan keuangan Dinas Sosial Kota Surabaya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya laporan keuangan akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan bahwa dana yang telah digunakan sektor publik tersebut telah menggunakan dana APBD secara ekonomis dan optimal. Dengan adanya akuntansi juga dapat membantu dalam penyusunan rencana kerja yang optimal dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan agar sesuai dengan target yang telah disusun.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa saran pada Dinas Sosial Kota Surabaya dan bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya, antara lain, (1) Untuk Dinas Sosial Kota Surabaya diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja organisasi dengan implementasi prinsip-prinsip *good governance* dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, (2) Untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada Dinas Sosial Kota Surabaya peneliti berharap adanya sosialisasi kepada sumber daya manusianya akan pemahaman prinsip-prinsip *good governance* yang meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Dalam suatu instansi, tidak semua karyawannya merupakan lulusan dari bidang akuntansi, maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang bertujuan dapat memberikan pelatihan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Serta memberikan sosialisasi terhadap penggunaan fasilitas dan teknologi yang baru, (3) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variable prinsip-prinsip *good governance* lainnya seperti: partisipasi, penegakan hukum, dan sebagainya yang belum digunakan dalam penelitian ini sehingga hasil penelitian selanjutnya akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik karena di dalam penelitian ini hanya menggunakan 5 variable.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Hariadi, P., Restianto, Y., dan Bawono, I. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Jakarta

- Mahsun, M., F. Sulistyowati, dan H. A. Purwanugraha. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Osborne, David, and Gaebler. 1992. *Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is Transforming the Public Sector*. Penguins Book. New York.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka. Jakarta
- Sadeli, Lili M. 2015. *Accounting Theory*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*. 19 Mei 1999. Jakarta